BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DIAGRAM ALIR

1. PPID Pelaksana Balai POM di Toba Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi.*

Waktu Mutu Baku : 3 HK

2. PPID Pelaksana Balai POM di Toba; PPID Pelaksana Balai POM di Toba Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ; PPID Pelaksana Balai POM di Toba Bidang Dokumentasi dan Arsip Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi.**

3. PPID Pelaksana Balai POM di Toba Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan.***

4. PPID Pelaksana Balai POM di Toba Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi.****

Waktu Mutu Baku : 30 HK

KETERANGAN

*
1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
   a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
   b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/atau
   c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
   a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
   b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
   c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
   d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
   e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

**
1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan.

***
1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Balai POM di Toba.
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
   a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
   b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
   c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau d. Dokumen sengketa Informasi Publik.

****
1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BPOM.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis.
3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.